



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN PINGGIR
TAHUN 2021-2026**



KANTOR CAMAT PINGGIR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dan ditetapkan.

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RENSTRA Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan disusun dengan berpedoman pada RPJMD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.

RENSTRA Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 ini dirumuskan dengan tahapan, tata cara serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Pinggir yang sejalan dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2021-2026 yaitu : **“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”**. Dengan demikian Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Kecamatan Pinggir dalam mencapai tujuan pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Di samping sebagai pedoman dalam perencanaan, Renstra ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sehingga pada saatnya nanti dapat terwujud pemerintahan yang baik (Good Governance). Semoga RENSTRA Tahun 2021-2026 ini menjadikan arah proses pembangunan Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis lebih terarah.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan tenaga dan pemikiran dalam penyelesaian Renstra ini, diucapkan terima kasih. Semoga Renstra Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis yang kita cintai.

Pinggir, Maret 2021

CAMAT PINGGIR



AZUAR, SH

NIP. 19640621 198603 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	8
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	22
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	23
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis.....	26
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	27
BAB V ARAH KEBIJAKAN.....	30
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	32



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN33

BAB VIII PENUTUP.....35

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi PNS Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Menurut Jenis Kelamin	9
Tabel 2.2	Komposisi PNS Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Menurut Golongan	9
Tabel 2.3	Komposisi PNS Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Menurut Eselon	10
Tabel 2.4	Komposisi PNS Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Menurut Pendidikan 11	
Tabel 2.5	Daftar aset yang dimiliki oleh Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis	12
Tabel 2.6	Capaian dan Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2020	15
Tabel 2.7	Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2020	16
Tabel 2.8	Target dan Realisasi Belanja Langsung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020.....	17
Tabel 2.9	Analisis Lingkungan Eksternal.....	18
Tabel 2.10	Analisis Lingkungan Internal.....	19
Tabel 2.11	Analisa SWOT	20
Tabel 3.1	Aspek, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Pinggir	26
Tabel 4 1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pinggir Tahun 2021-2026	31
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis 2021-2026	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Struktur Organisasi Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis	8
-------------	---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis, maka tugas pokok Perangkat Daerah Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya, maka perlu disusun dokumen perencanaan, baik tahunan maupun jangka menengah yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) ini merupakan hasil *breakdown* dari dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD).

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk: (1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan; dan (3) memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna

mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban perangkat daerah.

Renstra Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pinggir yaitu sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam hal melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan umum.

Renstra Kecamatan Pinggir harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya terutama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra. Dalam penyusunan RPJMD terdapat uraian tentang analisis dan proyeksi pelayanan masyarakat dalam lima tahun kedepan. Hal ini sangat penting dan menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Pinggir karena melalui proyeksi pelayanan masyarakat tersebut tertuang tantangan pelayanan Kecamatan Pinggir dalam mendorong peningkatan kepuasan masyarakat. Renstra Kecamatan Pinggir juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pinggir karena Renstra merupakan pedoman dalam perumusan Renja tahunan perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dalam penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Pinggir dimaksudkan sebagai penjabaran RPJMD untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pinggir dalam pengelolaan pendapatan daerah dan potensi sumber daya daerah;
2. Mengakomodir visi, misi, tujuan, sasaran dan program Bupati Bengkalis sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Kecamatan Pinggir;
3. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Pinggir;
4. Memberikan fondasi yang baik bagi penyusunan Renja maupun pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Pinggir di masa mendatang;
5. Pedoman dalam penyusunan Renja tiap tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pinggir, telaah terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

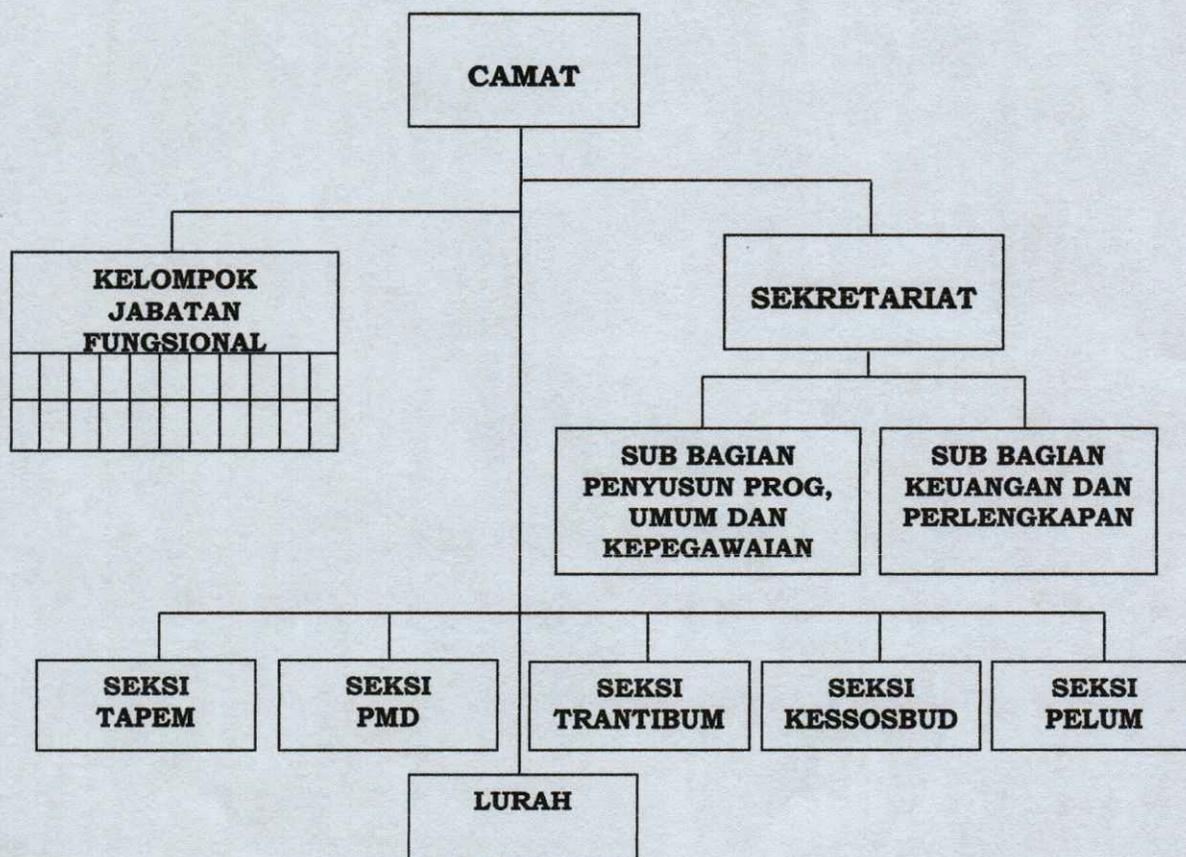
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dan melaksanakan urusan pemerintahan di kecamatan. Adapun fungsi Camat adalah :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum
2. Penggordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
3. Penggordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Struktur Organisasi Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

Gambar 1

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per Februari 2021, jumlah pegawai pada Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis adalah 34 orang PNS dan Tenaga

Kontrak sebanyak 64 orang. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, eselonering dan pendidikan, PNS pada Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1

Komposisi PNS Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Menurut Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1	SEKRETARIAT	6	4	10
2	SEKSI TAPEM	3	1	4
3	SEKSI KESOSBUD	2	0	2
4	SEKSI PMD	2	0	2
5	SEKSI PELAYANAN UMUM	0	0	0
6	SEKSI TRANTIBUM	3	0	3
7	KELURAHAN TITIAN ANTUI	4	3	7
8	KELURAHAN BALAI RAJA	3	3	6
TOTAL		23	11	34

Sumber: Sekretariat Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 34 orang PNS dilingkungan Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, 23 orang (59.18%) adalah laki-laki dan 11 orang (40.82%) adalah perempuan. Selain itu, juga diketahui bahwa sejumlah 21 orang PNS (43,88%) Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis bekerja pada Kantor Camat dan sisanya sejumlah 13 orang (56.1,%) merupakan pegawai yang bertugas di Kelurahan se-Kecamatan Pinggir.

Tabel 2.2

Komposisi PNS Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN			
		I	II	III	IV
1	SEKRETARIAT	1	4	4	1
2	SEKSI TAPEM		3	1	
3	SEKSI KESOSBUD		1	1	
4	SEKSI PMD		1	1	

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN			
		I	II	III	IV
5	SEKSI PELAYANAN UMUM				
6	SEKSI TRANTIBUM		2	1	
7	KELURAHAN TITIAN ANTUI		2	5	
8	KELURAHAN BALAJA RAJA		1	5	
TOTAL		1	13	18	1

Sumber: Sekretariat Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, Tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sebagian besar adalah Golongan II mencapai 13 orang atau 39,80% dan golongan III mencapai 18 orang atau 59,20%, sedangkan Golongan IV hanya sejumlah 1 orang atau 1,02%. Kondisi ini mengakibatkan adanya pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Golongan II tetapi dilaksanakan oleh pegawai Golongan III, bahkan tidak menutup kemungkinan dari Golongan IV.

Tabel 2.3
Komposisi PNS Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Menurut Eselon / Peta Jabatan

NO	UNIT KERJA	ESELON			JML
		II	III	IV	
1	SEKRETARIAT		2	2	4
2	SEKSI TAPEM			1	1
3	SEKSI KESOSBUD			1	1
4	SEKSI PMD			1	1
5	SEKSI PELAYANAN UMUM				
6	SEKSI TRANTIBUM			1	1
7	KELURAHAN TITIAN ANTUI			5	5
8	KELURAHAN BALAJA RAJA			5	5
TOTAL					18

Sumber: Sekretariat Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 18 jabatan eselon di lingkungan Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.4
Komposisi PNS Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Menurut Pendidikan

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN				
		S2	S1	D3	SMA	SMP
1	SEKRETARIAT		4		4	1
2	SEKSI TAPEM			1	3	
3	SEKSI KESOSBUD		1		1	
4	SEKSI PMD		1		1	
5	SEKSI PELAYANAN UMUM					
6	SEKSI TRANTIBUM		1		2	
7	KELURAHAN TITIAN ANTUI		4	1	2	
8	KELURAHAN BALAI RAJA		4	1	1	
TOTAL			15	3	14	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, Tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis didominasi dengan tingkat pendidikan SMA s/d S1 yaitu sejumlah 29 orang atau sebesar 94.90%. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya. Namun demikian, tidak diperoleh data terkait dengan pendidikan non formal yang telah dipenuhi, sehingga tidak dapat diberikan gambaran keberadaan sumber daya manusia dari sisi keahlian teknis maupun fungsional di lingkungan Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Perangkat Daerah Kecamatan Pinggir.

Tabel 2.5
Daftar asset yang dimiliki oleh Kecamatan Pinggir

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
Kantor Camat Pinggir						
1	Mobil	4	4			
2	Motor	15	6	5	4	
3	AC	34	30		4	
4	Komputer	15	10		5	
5	Laptop	7	5		2	
6	Printer	14	9	1	4	
7	Sound System	2	2			
8	Lemari Es	2	2			
9	Vacum	2	1		1	
10	TV	4	2	1	1	
11	Mesin Cuci	2	2			
12	Server Paten	1	1			
13	CCTV	6	6			
14	Tripod Kamera	2	1		1	
15	Microphone	6	3		3	
16	Kamera Vidio	1			1	
17	Kamera	1			1	
Kelurahan Titian Antui						
1	Kendaraan Dinas Roda Dua	2	1		1	
2	Ac	2	2			
3	Laptop	1		1		
4	Komputer	2	1	1		
5	Printer	2	1		1	
6	Mesin Ketik	2	1	1		
7	Kipas Angin Gantung	2	2			
8	Mikrofon	2	2			
9	Wireless	1	1			
10	Speaker	1	1			
Kelurahan Balai Raja						
1	Kendaraan Dinas Roda Dua	2			2	
2	Becak Motor Vlar					
3	Ac	4	1	1	2	
4	Komputer	3	2		1	
5	Laptop	2			2	
6	Printer	3	2		1	
7	Kulkas	1	1			
8	Meja Kerja	8	8			
9	Meja Rapat	1	1			
10	Kursi Kerja	12	12			

11	Kursi Plastik	100	100			
12	Tempat Sampah Besi	4	4			
13	Lemari Arsip	2	2			
Total		276	229	11	37	0

Sumber: Sekretariat Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, Tahun 2021.

Tabel di atas menjelaskan jumlah asset yang dimiliki oleh Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis berupa kelengkapan dan peralatan kantor yang ada di kantor Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat total 276 aset di lingkungan Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Dari total tersebut, 229 aset memiliki kondisi yang baik dengan persentase 97,50%. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan aset di lingkungan Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis di tahun berikutnya

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefenisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/ kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat. Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan pelayanan yang disesuaikan

dengan berbagai aspek pelayanan umum dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah.

Capaian pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan indikator RPJMD Kabupaten Bengkalis dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2020 adalah sebagai berikut ;

Tabel 2.5

Capaian dan Realisasi

Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pinggir 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN TAHUNAN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	55%	70%	72%	75%	77%	81,44%	80,50%	89,49%	90,38%	89,18%
2	Persentase Kelurahan/ Desa dengan Kinerja Baik	80%	80%	85%	95%	100%	90%	85%	85%	95%	96%
3	Persentase Penurunan Gangguan KAMTIBMAS	-	-	-	80%	90%	-	-	-	100%	100%

2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan

Di samping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

a. Belanja Tidak Langsung (BTL)

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai baik pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai) Tahun Anggaran 2016-2020 adalah sejumlah Rp. 19,253,000,447,00 (sembilan belas milyar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh rupiah) atau sebesar 90,27% dari dana yang tersedia dalam DPPA yaitu sejumlah Rp. 21,055,582,517,00 (dua puluh satu milyar lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah). Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2 6
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2016	4.732.449.694,00	4.195.256.474,00	88,65
2	2017	4.410.958.765,00	3.615.399.450,00	81,96
3	2018	3.579.904.803,00	3.307.893.929,00	92,40
4	2019	4,253.346.667,00	4.117.504.095,00	96,81
5	2020	4.078.922.588,00	4.016.946.499,00	98,48
Jumlah		21,055,582,517	19,253,000,447	90,27

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penyerapan dana anggaran Belanja Tidak Langsung sudah cukup optimal dengan predikat “tinggi”. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak digunakan mencapai Rp 1,802,582,070,00 (satu milyar delapan ratus dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh puluh rupiah).

b. Belanja Langsung (BL)

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016-2020 yang tersedia dalam DPA sejumlah Rp. 32,824,412,621.00 (tiga puluh dua milyar delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus dua belas ribu enam ratus dua puluh satu rupiah). Sedangkan realisasinya adalah sejumlah Rp. 29,453,694,500.00 (dua puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 97,82 %. Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2 7
Target dan Realisasi Belanja Langsung
Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2016	9.240.105.345,00	8.318.038.043,00	90,02
2	2017	5.990.547.485,00	4.275.196.026,00	71,37
3	2018	6.055.010.211,00	5.698.874.533,00	94,12
4	2019	5.620.624.100,00	5.425.260.876,00	96,52
5	2020	5.918.125.480,00	5.736.325.022,00	96,93
Jumlah		32,824,412,621.00	29,453,694,500.00	97,82

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sudah cukup baik dengan predikat “tinggi”. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak terealisasi mencapai Rp. 3,370,718,121,00 (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus dua puluh satu rupiah).

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah di masa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang

berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Adapun peluang yang dihadapi Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dalam mengembangkan pelayanan perangkat daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 2 8
Analisis Lingkungan Eksternal

<i>Peluang (Opportunities)</i>	<i>Ancaman/Tantangan (Threats)</i>
1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai kecamatan dan wewenangnya Yaitu Kecamatan sebagai unsur perangkat daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 dan segala turunannya Permendagri 130 Tahun 2018. Selain itu menerima pendelegasian wewenang dari kepala daerah.	1. Koordinasi antar instansi terkait dan pemangku kepentingan belum memadai; Masih terdapatnya kendala dalam proses koordinasi dengan dinas terkait, hal ini bisa menjadi hambatan untuk pencapaian Tujuan terutama dalam penanganan kasus tertentu
2. Masih banyaknya potensi wilayah yang memiliki peluang pengembangan yang belum tergali yang dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kecamatan Pinggir.	2. Kondisi geografis Aksesabilitas masyarakat belum terpenuhi secara baik sehingga pelayanan masyarakat menjadi terhambat. Ditambah Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yg semakin meningkat
3. Penggunaan teknologi informasi yang memadai dan modern. Sistem informasi sangat dibutuhkan dalam digitalisasi pelayanan	3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap adminitrasi pelayanan
4. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.	4. Belum terpenuhinya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Masih banyaknya masyarakat yang mengeluh terhadap pelayanan publik.

Tabel 2 9**Analisis Lingkungan Internal**

<i>Kekuatan (Strengths)</i>	<i>Kelemahan (weakness)</i>
1. Mempunyai SOTK yang sudah jelas;	1. Kualitas SDM masih belum memadai Meskipun dari segi jumlah sudah terhitung memadai, namun dari segi kualitas masih dirasa perlu untuk lebih ditingkatkan dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pengelolaan pelayanan publik, sehingga pemahaman dan implementasinya sesuai dengan yang diharapkan yaitu SDM yang handal dan profesional
2. Disiplin dan Tanggungjawab sudah baik;	2. Kurang optimalnya penerapan SOP
3. Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi	3. Jumlah sarana dan prasarana yang belum memadai.
	4. Jumlah aparatur yang Belum memadai.

Berdasarkan analisa SWOT, maka dapat kita tentukan alternatif strategi yang akan dilakukan Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis antara lain:

Tabel 2 10
Analisa SWOT

<p>Faktor Eksternal</p>	<p>Peluang (O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai kecamatan dan wewenangnya Yaitu Kecamatan sebagai unsur perangkat daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 dan segala turunannya Permendagri 130 Tahun 2018. Selain itu menerima pendelegasian wewenang dari kepala daerah. 2. Masih banyaknya potensi wilayah yang memiliki peluang pengembangan yang belum tergali yang dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kecamatan Pinggir. 3. Penggunaan teknologi informasi yang memadai dan modern. Sistem informasi sangat dibutuhkan dalam digitalisasi pelayanan 4. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 	<p>Tantangan (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antar instansi terkait dan pemangku kepentingan belum memadai Masih terdapatnya kendala dalam proses koordinasi dengan dinas terkait, hal ini bisa menjadi hambatan untuk pencapaian Tujuan terutama dalam penanganan kasus tertentu 2. Kondisi geografis Aksesabilitas masyarakat belum terpenuhi secara baik sehingga pelayanan masyarakat menjadi terhambat Ditambah Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yg semakin meningkat 3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap adminitrasi pelayanan 4. Belum terpenuhinya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Masih banyaknya masyarakat yang mengeluh terhadap pelayanan publik
<p>Faktor Internal</p>	<p>Kekuatan (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai SOTK yang sudah jelas 2. Disiplin dan Tanggungjawab sudah 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.

<p>baik</p> <p>3. Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi</p>		
<p>Kelemahan (W):</p> <p>1. Kualitas SDM masih belum memadai Meskipun dari segi jumlah sudah terhitung memadai, namun dari segi kualitas masih dirasa perlu untuk lebih ditingkatkan dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pengelolaan pelayanan publik, sehingga pemahaman dan implementasinya sesuai dengan yang diharapkan yaitu SDM yang handal dan professional</p> <p>2. Kurang optimalnya penerapan SOP</p> <p>3. Jumlah sarana dan prasarana yang belum memadai.</p> <p>4. Jumlah aparatur yang Belum memadai.</p>	<p>Alternatif Strategi (W-O)</p> <p>1.</p>	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <p>1.</p>

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat dirumuskan permasalahan utama Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis adalah "**Pelayanan Publik yang belum Prima**", yang tergambar dari data yang menunjukkan bahwa pelayanan publik belum optimal.

Permasalahan utama tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain:

1. Permasalahan dalam Pelayanan.

Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat bahwa:

- a. Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan
- b. Letak geografis masyarakat sebagai daerah kepulauan
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen perizinan dan atau non perizinan
- d. Pemanfaatan Teknologi Informasi belum maksimal
- e. Masih rendahnya koordinasi antar lembaga vertikal, horizontal dan desa.
- f. Lemahnya koordinasi dalam penanganan bencana, penyakit masyarakat dan lingkungan
- g. Masih adanya konflik masyarakat
- h. Masih adanya konflik batas administrasi
- i. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- j. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan kemasyarakatan

Dengan demikian, permasalahan dalam pelayanan Kecamatan Pinggir lebih kepada permasalahan internal sebagai penyebabnya.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan. *Impact* pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”**.

Bermarwah merupakan suatu kondisi dimana masyarakatnya memiliki kebanggaan sebagai masyarakat yang bermartabat dengan terbentuknya karakter masyarakat berpengetahuan dan memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan landasan keagamaan dan kebudayaan. Maju merupakan suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhinya semua kebutuhan baik pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan pemanfaatan teknologi, ditandai dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia yang kompetitif serta masyarakat yang lebih mandiri yang didukung oleh birokrasi pemerintah yang professional dan berwibawa. Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhinya kebutuhan dasar sebagai wujud dari pembangunan yang adil dan merata dan menyentuh semua aspek kehidupan yang ditandai dengan tingkat pendapatan yang cukup, rendahnya angka kemiskinan, rendahnya tingkat kriminal serta tingkat kesehatan dan pendidikan yang sangat baik.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pengelolaan potensi keuangan daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian.

2. Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.
3. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat.

Dari rumusan visi dan misi tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pinggir yaitu pada Misi II, yaitu:

1. Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.

Salah satu komponen dari perencanaan strategis adalah tujuan dan sasaran pembangunan yang mengacu pada pernyataan visi dan misi. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan selama periode perencanaan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Daerah Di Indonesia.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, Visi-Misi Kepala Daerah, maka isu strategis pada Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3 1

Aspek, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Pinggir

NO	ASPEK	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
1	Permasalahan dalam Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan2. Letak geografis masyarakat sebagai daerah kepulauan3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen perizinan dan atau non perizinan4. Pemanfaatan Teknologi Informasi belum maksimal5. Masih rendahnya koordinasi antar lembaga vertikal, horizontal dan desa.6. Lemahnya koordinasi dalam penanganan bencana, penyakit masyarakat dan lingkungan7. Masih adanya konflik masyarakat8. Masih adanya konflik batas administrasi9. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan10. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan kemasyarakatan	Pelayanan Publik yang belum Prima

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi Bupati dan wakil Bupati tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam rencana strategis Kecamatan Pinggir yang merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 dengan tujuan dan sasaran strategis tertuang dalam Misi II RPJMD akan menjadi dasar penyusunan kinerja Pelayanan pada Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Renstra Kecamatan Pinggir dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki keterkaitan sangat erat dalam mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter

Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis



Tahun 2021-2026 serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4 1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Indikator Tujuan/Sasaran (3)	Data Target Enam Tahun mendatang					
			2021 (5)	2022 (6)	2023 (7)	2024 (8)	2025 (9)	2026 (10)
Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88 %	89 %	90 %	91 %	94 %	95 %
	Meningkatnya kualitas sosial masyarakat	Persentase penurunan gangguan KANTIBMAS	80 %	82 %	85 %	87 %	90 %	93 %
		Persentase desa/keluurahan dengan kinerja baik	C	C	B	B	A	A

Sumber:RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

BAB V

ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis 2021-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 5 1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Renstra Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis 2016 - 2020

Visi RPJMD	Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera		
Misi ke-II	Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat	Menyelenggarakan tertib urusan pemerintahan umum
		Penguatan kebijakan ketentruman dan ketertiban umum	Menyelenggarakan standard pelayanan publik
	Meningkatnya kualitas sosial masyarakat	Penguatan kebijakan pembinaan masyarakat dan desa serta kelurahan	Mengkoordinasikan penyelenggaraan operasi ketentruman dan ketertiban umum Mengkoordinasikan penengggakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
			Menyelenggarakan pembinaan pemberdayaan dan pemerintahan desa serta kelurahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program Kegiatan pada Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis pada prinsipnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pinggir.

Adapun Program dan Kegiatan Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 direncanakan pada periode tahun 2021-2026, selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini :

MATRIS RENSTRA 2021-2026

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN

KODE	LOKASI	URUSAN/BEKAS URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
01	Indrajaya	PROGRAM PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	01.2.01.01	0	7.600.000,00	11	138.000,00	13	148.800,00	15	163.200,00	17	179.680,00	15	
			01.2.01.02	0	6.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			01.2.01.03	0	110.160,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			01.2.01.04	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			01.2.01.05	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			01.2.01.06	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			01.2.01.07	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			01.2.01.08	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			01.2.01.09	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			01.2.01.10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02	Kecamatan Indrajaya	PROGRAM PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	02.2.01.01	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
			02.2.01.02	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
			02.2.01.03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
			02.2.01.04	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
			02.2.01.05	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
			02.2.01.06	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
			02.2.01.07	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
			02.2.01.08	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
			02.2.01.09	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
			02.2.01.10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
03	Kecamatan Indrajaya	PROGRAM PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	03.2.01.01	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
			03.2.01.02	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
			03.2.01.03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
			03.2.01.04	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
			03.2.01.05	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
			03.2.01.06	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
			03.2.01.07	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
			03.2.01.08	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
			03.2.01.09	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
			03.2.01.10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
04	Kecamatan Indrajaya	PROGRAM PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	04.2.01.01	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
			04.2.01.02	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
			04.2.01.03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
			04.2.01.04	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
			04.2.01.05	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
			04.2.01.06	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
			04.2.01.07	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
			04.2.01.08	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
			04.2.01.09	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
			04.2.01.10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Selengkapnya target-target capaian kinerja Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis untuk periode 2021-2026 yang akan datang disajikan pada tabel 7.1. berikut ini.

Tabel 7 1
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis 2021 - 2026

No	Indikator	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	88 %	88 %	89 %	90 %	91 %	94 %	95 %	95 %
2.	Persentase penurunan gangguan KANTIBMAS	80 %	80 %	82 %	85 %	87 %	90 %	93 %	93 %
3.	Persentase desa/keluarhan dengan kinerja baik	C	C	C	B	B	A	A	A

Indikator kinerja yang disajikan merupakan alat ukur dalam penilaian capaian yang dikehendaki dari implementasi program perangkat daerah. Dalam tabel 7.1. tersebut, terdapat tiga indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Kecamatan Pinggir sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan dalam Renstra ini, tidak boleh menjadi sekumpulan niat baik saja. Oleh karena itu penting bagi Kecamatan Pinggir untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

Pinggir, Maret 2021

CAMAT PINGGIR



AZUAR, SH

NIP. 19640621 198603 1 005